

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penyajian data dan analisis penelitian pada bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan secara umum belum dikelola secara optimal, efektif dan efisien sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan. Penghapusan Aset Tetap yang Tidak Digunakan yaitu aset dengan kondisi Rusak Berat tidak terlaksanakan dengan tuntas. Direktorat KKHL belum menerapkan cara yang sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan inventarisasi. Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian untuk masing-masing aspek dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran

Pengelolaan BMN Direktorat KKHL dari aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran dimulai dari penyusunan RKBMN dan penyusunan anggaran BMN dapat dianalisis bahwa penyusunan disusun sesuai kebutuhan namun belum dilengkapi

dengan data dukung penghapusan BMN. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan dari aspek perencanaan kebutuhan dan penganggaran belum memenuhi perencanaan yang baik.

2. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengelolaan BMN Direktorat KKHL dari aspek pengamanan dan pemeliharaan dilakukan dengan cara inventarisasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan kondisi barang antara di laporan dengan kondisi di lapangan. Penyebabnya dikarenakan Petugas BMN tidak melakukan pemutakhiran (*updating*) laporan kondisi barang. Kendala dalam inventarisasi adalah menumpuknya barang di gudang penyimpanan aset, adanya BMN yang tidak berstiker label BMN, dan belum adanya Daftar Barang Ruangan. Penghematan anggaran biaya pengamanan dan pemeliharaan tidak terlaksana karena BMN Rusak Berat terus bertambah tanpa ada penghapusan. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan dari aspek pengamanan dan pemeliharaan belum dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.

3. Aspek Penghapusan dan Pemindahtanganan

Pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL dari aspek penghapusan dan pemindahtanganan dilakukan dalam bentuk pengalihan kepemilikan, pemusnahan dan pemindahtanganan BMN yang

dilakukan dengan cara penjualan atau lelang pada Aset Tetap yang Tidak Digunakan dengan kondisi barang Rusak Berat berupa Peralatan dan Mesin. Namun dalam proses penjualan BMN belum tuntas karena gagal lelang disebabkan pembeli wanprestasi yaitu sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan tidak melunasi harga lelang. Direktorat KKHL belum melaksanakan penghapusan BMN secara teratur disebabkan oleh petugas BMN kurang maksimal dalam bekerja. Maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan dari aspek penghapusan dan pemindahtanganan belum dilaksanakan dengan optimal, efektif dan efisien.

4. Aspek Pengawasan dan Pengendalian

Pengelolaan BMN Direktorat KKHL dari aspek pengawasan dan pengendalian dilaksanakan oleh KPB dengan cara memeriksa data dari Petugas BMN secara periodik, dan meminta aparat pengawas fungsional untuk melakukan audit tindak lanjut hasil pemantauan dan penertiban BMN. Pengendalian belum optimal karena petugas BMN kurang maksimal dalam melakukan inventarisasi. Adanya BMN yang tidak berstiker label BMN menyulitkan ketika proses penghapusan. Maka dapat disimpulkan bahwa Pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan dari aspek pengawasan dan pengendalian belum sepenuhnya memenuhi pengendalian yang baik.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, peneliti dapat menyampaikan saran-saran mengenai pengelolaan BMN pada Direktorat KKHL Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:

1. Aspek Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran:

Menginstruksikan petugas BMN agar melengkapi data dukung perencanaan yaitu dokumen pengajuan penjualan atau Lelang kendaraan ke KPKNL sebanyak 7 unit agar usulan pengadaan baru dapat disetujui karena sesuai dengan jumlah *exsisting* kendaraan yaitu sebanyak 5 unit.

2. Aspek Pengamanan dan Pemeliharaan:

Memerintahkan petugas BMN agar melakukan inventarisasi dengan cara menempel stiker label BMN permanen, membuat Daftar Barang Ruangan dan mencatat kondisi barang baik secara manual juga menginput ke dalam aplikasi SIMAK BMN sesuai dengan hasil inventarisasi.

3. Aspek Penghapusan dan Pemindahtanganan:

- a. Menginstruksikan petugas BMN agar menginventarisasi BMN yang sudah Rusak Berat dengan atau tanpa Surat Tugas untuk selanjutnya dilakukan pengusulan penghapusan.
- b. Berkoordinasi secara tertulis serta mengadakan pertemuan kepada Biro Keuangan KKP juga berkonsultasi kepada KPKNL untuk dapat menurunkan nilai limit penjualan atau lelang BMN.

4. Aspek Pengawasan dan Pengendalian:

Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Inspektorat Jenderal KKP, Biro Keuangan KKP dan KPKNL dalam rangka peningkatan pengawasan dan pengendalian BMN.



POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Margono. (2016), *Modul Materi Konsep Dasar Pengelolaan BMN*, Jakarta: Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan.
- Moleong, Lexy. J. (2017), *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.
- Patilima, Hamid. (2016), *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV. ALFABETA.
- Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV. ALFABETA.
- Suprihanto, John. (2014), *Manajemen*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Wahjono, Sentot. I. dkk. (2019), *Pengantar Manajemen*, Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Wahyuni, Sri dan Rifki Khoirudin. (2020). *Pengantar Manajemen Aset*. Makassar: CV. Nas Media.
- Wibowo. (2019), *Manajemen: Dari Fungsi Dasar ke Inovasi*, Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Wijayanto, Dian. (2012), *Pengantar Manajemen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

B. Jurnal

- Amiri Kartika (2016). Pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) Secara Akuntabel Menuju *Good Governance*: Jurnal Potret Pemikiran, ISSN: 1693-1874/e-ISSN: 2528-0376; 31 – 44
- Hartati S, Rita M, Hadi W (2019). Manajemen Aset Bagi Optimalisasi Pengelolaan Aset Tetap (Kajian pada Pemerintah Kota Palembang): Jurnal Riset Terapan Akutansi, Volume 3, 40-51.
- Zadrak R Kermite, Sapto P Arso, Nurhasmadiar N (2021). Pengelolaan Aset Tetap BMN Ditinjau dari Permenkes No 9 Tahun 2018

Tentang Pedoman Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Kesehatan (Penelitian pada Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit Kelas II Ambon): Jurnal Administrasi Kantor (e-Journal), Volume 9, 523-528

C. Skripsi

Ningsih T, Maya (2018). Analisis Sistem Pengelolaan BMN pada Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pekanbaru. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru.

Sandra, Willian (2017). Pengelolaan BMN di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau. Skripsi. Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas Riau.

Sari P, Dwi (2012). Analisis Pengelolaan BMN (BMN) di Bidang Peralatan Khusus Penanggulangan Keamanan Berkadar Tinggi Studi Kasus : Mako Korps Brimob Polri Kelapa Dua Depok Tahun 2011. Skripsi. Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia.

D. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akutansi Pemerintah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 15/PERMEN-KP/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 150/PMK.06/2014 tentang Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara.

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 48/PERMEN-KP/2018 tentang Pengamanan dan Pemeliharaan BMN di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan BMN

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 111/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan BMN

Peraturan Menteri Kelautan Nomor 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 49/KEPMEN-KP/2020 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pengguna Barang dalam bentuk Mandat kepada Pejabat Tertentu dan/atau Kuasa Pengguna Barang dalam rangka Pengelolaan Barang Milik Negara Kementerian Kelautan dan Perikanan

E. Dokumen-Dokumen

Pedoman Penulisan Tugas Akhir STIA-LAN (2000)

F. Sumber Internet

Hanafi, Mamduh. 2015. Modul 1 Konsep Dasar dan Perkembangan Teori Manajemen. Situs: <http://repository.ut.ac.id/> (Diakses 23 Agustus 2021)

<https://www.bpk.go.id/lkpp>

<https://kbbi.kemdikbud.go.id/>